



# Daya Serang KPK Tumpul

**JAKARTA**-Komisi Pemberantasan Korupsi ngotot mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan praperadilan Hadi Poernomo. Pengajuan PK ini mendapat tanggapan beragam dari praktisi hukum di Tanah Air. Entah kenapa KPK memperlakukan berbeda dengan putusan praperadilan Budi Gunawan. KPK tidak berani memaksakan PK terhadap putusan Budi Gunawan.

Lembaga antikorupsi ini mengajukan PK terhadap Hadi Poernomo karena ada muatan politik di dalamnya. Hadi Poernomo merupakan pejabat yang membuka audit rekening Bank Century ketika itu sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ■

Demikian terungkap dalam diskusi hukum 'Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Terkait Hasil Audit BPK' di kawasan Senayan, Jumat (26/6) malam. Hadir sebagai pembicara Adhie M. Massardi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Piter Siringoringo, SH, Ketua DPC Peradi Jakarta Timur, dan Togar SM Sijabat Dosen Universitas Kristen Indonesia.

Adhie mengatakan, Hadi Poernomo merupakan pengganti Anwar Nasution sebagai Ketua BPK. Dari situlah Hadi meneruskan audit Bank Century dan temuan itulah menjadikannya sebagai target. "Jika tidak ada Hadi Poernomo, maka tidak ada skandal Century," jelas Adhie.

Kekalahan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Andhie, daya serang KPK memang tumpul. KPK sejauh ini hanya berani menghadapi kasus-kasus tertentu yang tidak begitu besar, namun sangat dikesakan besar dan sensasional. "Kita perlu melihat sejarah pembentukan KPK. Benar bahwa Indonesia mem-

butuhkan lembaga pemberantasan korupsi, tapi KPK yang kita miliki sekarang didesain oleh orang lain, dengan maksud lain," kata mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid.

Sementara, Akademisi Universitas Kristen Indonesia Togar SM Sijabat, SH, MH mengatakan, upaya KPK melakukan PK dinilai demonstratif. Mengapa? Dengan pengajuan PK seolah KPK menunjukkan kepada masyarakat bahwa lembaga antirasuah itu terus berjuang melawan kekalahan di praperadilan. "Padahal KPK sudah tahu betul bahwa PK tidak diatur untuk penegak hukum seperti KPK, dan putusan praperadilan tidak bisa dilawan dengan upaya hukum apa pun," kata Togar.

Menurut Adhie ke depan agar KPK tidak diintervensi oleh kepentingan kelompok politik tertentu, maka dalam seleksi pimpinan KPK harus bersih dan bebas dari kepentingan kelompok mana pun.

Seperti diketahui KPK melakukan PK terhadap Hadi Poernomo setelah kalah dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. (ibl/aph/dyn)